

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

LAUDYA VELOVIA GUSTIRA

2456041031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Grand Theory: Teori Administrasi Publik	17
2.2.2 Middle Theory: <i>Good Governance</i>	18
2.2.3 Applied Theory: Governansi Digital	19
2.3 Definisi Konseptual Variabel	20
2.3.1 Media Sosial (X)	20
2.3.2 Transparansi (Y ₁)	21
2.3.3 Akuntabilitas (Y ₂)	22
2.4 Kerangka Berpikir	23
2.5 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Paradigma Penelitian	27
3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian	28

3.3	Lokasi dan Objek Penelitian	29
3.3.1	Lokasi Penelitian	29
3.3.2	Objek Penelitian	29
3.4	Populasi dan Sampel	31
3.4.1	Populasi	31
3.4.2	Sampel	31
3.4.3	Teknik Pengambilan Sampel	32
3.5	Metode Operasionalisasi Konsep	33
3.6	Metode Pengumpulan Data	36
3.7	Metode Pengujian Data	37
3.8	Metode Analisis Data	39
3.10	Keterbatasan Penelitian	42
DAFTAR PUSTAKA		44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan Internet dan Media Sosial di Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	16
Tabel 3. Akun TikTok Bupati Pringsewu	30
Tabel 4. Definisi Operasional.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	24
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengakses informasi melalui internet dan media sosial, sehingga pola komunikasi antara pemerintah dan warga negara mengalami transformasi yang cepat. Media sosial telah menjadi salah satu media utama bagi pemerintah daerah sebagai penyampaian informasi, berinteraksi dengan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui media sosial, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah yang lebih efektif, mempercepat penyampaian informasi, dan mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan maupun melaporkan permasalahan yang dihadapi. Fenomena ini muncul menjadi bentuk terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap keterbukaan dan kualitas pelayanan publik. Kini, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan layanan, tetapi juga mencakup kemampuan mendengarkan aspirasi masyarakat, menanggapi keluhan, dan membangun hubungan yang lebih responsif melalui kanal digital yang tersedia.

Dalam masa yang serba digital ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memicu transformasi besar di berbagai bidang, khususnya pada pengelolaan pemerintahan (Aprilla et al., 2024). Bagi masyarakat, penggunaan media sosial telah terbukti efektif menjadi media bagi masyarakat untuk memberi aspirasi, memberikan saran, dan mengawasi kinerja pemerintah. Fenomena ini tercermin dalam kasus viral TikToker Bima Yudho yang mengkritik kondisi infrastruktur di Lampung, serta diikuti oleh influencer lain yang berani menyuarakan pendapatnya. Lebih lanjut, media sosial juga

berperan penting dalam mengungkap kasus serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak berusia 10 tahun di mess pekerja perkebunan tebu PT Indolampung, Kabupaten Tulang Bawang. Kasus ini baru diusut setelah informasi tersebut viral di media sosial. Lewat tagar, video, dan konten informatif, gerakan-gerakan ini mampu menjangkau banyak orang dengan cepat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara nyata, misalnya melalui penandatanganan petisi, ikut demonstrasi, dan tindakan lainnya yang tentunya dapat mempengaruhi orang lain (Raifangga et al., 2025).

Fenomena ini menunjukkan media sosial berperan signifikan mendorong partisipasi publik, mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Media sosial juga berfungsi sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah serta lembaga terkait, sehingga pejabat publik terdorong untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab (Cahyadi, 2024). Pemanfaatan media sosial juga berkontribusi dalam membentuk budaya birokrasi yang responsif, terbuka, dan partisipatif, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, media sosial menempati posisi strategis sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel di Kabupaten Pringsewu.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa atau sekitar 78,19% dari total populasi. Laporan *We Are Social* (2024) juga mencatat bahwa pengguna aktif media sosial mencapai 167 juta orang atau 60,4% dari populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 3 jam 11 menit per hari. Platform yang paling populer adalah WhatsApp (92,1%), Instagram (86,5%), dan TikTok (70,8%). Data ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat daerah. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu tahun 2024, dari total penduduk sekitar 444.834 jiwa, tercatat 318.546 orang atau 71,6% telah menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, sekitar 214.381 orang atau 48,2% aktif memanfaatkan media sosial. Angka ini menegaskan, hampir separuh masyarakat Pringsewu menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan interaksi, termasuk dalam mengakses transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.

Tabel 1. Penggunaan Internet dan Media Sosial di Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Indikator	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Jumlah Penduduk	444.834	100
Pengguna Internet	318.546	71,6
Non-Pengguna Internet	126.288	28,4
Pengguna Media Sosial	214.381	48,2
Non-Pengguna Media Sosial	230.453	51,8

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu (2024), diolah.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sekitar tujuh dari sepuluh penduduk Kabupaten Pringsewu telah menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari. Pola pemanfaatan internet di daerah ini sejalan dengan tren provinsi, di mana media sosial menjadi aktivitas dominan, diikuti oleh komunikasi daring melalui aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta kegiatan pencarian informasi.

Hal ini mencerminkan bahwa media sosial tidak terbatas pada aspek hiburan semata, tetapi juga berperan sebagai media interaksi, komunikasi, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Pringsewu. Dalam akun resmi Bupati Pringsewu, yaitu @bupati.pringsewu dan @mas.riyanto.klangenan, secara rutin digunakan untuk mengunggah konten yang berisi informasi mengenai kegiatan pemerintahan yang dikemas dengan gaya yang mudah diterima masyarakat

terutama kalangan anak muda. Melalui pemanfaatan media sosial tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja Bupati secara langsung, termasuk melalui platform TikTok

Penggunaan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki urgensi strategis dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah harus menyediakan informasi dengan jelas, benar, serta dapat dipercaya bagi masyarakat. Tujuan dari ketentuan ini adalah memastikan warga negara bisa mengakses informasi mengenai proses pembuatan kebijakan publik, ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan menilai kinerja lembaga pemerintahan.

Pada masa digital saat ini, media sosial berperan penting bagi pemerintah daerah, termasuk Bupati Kabupaten Pringsewu, untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan terbuka, sekaligus membangun interaksi langsung dengan masyarakat. Melalui media sosial, publik tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat aktif memberikan masukan atau mengawasi kinerja pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu, sekaligus memperkuat keyakinan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Banyaknya pengguna media sosial dapat membantu meningkatkan persepsi publik terhadap good governance, masyarakat dapat memantau langsung kinerja dari pejabat publik tersebut sehingga muncul transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Media sosial berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan terhadap dan dapat menghindari dari praktik korupsi (Raifangga et al., 2025). Selain itu, pemanfaatan media sosial dapat memperkuat mekanisme pengawasan publik dan mencegah praktik korupsi, sehingga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pemerintah (Cahyadi, 2024). Di Kabupaten Pringsewu, meskipun adopsi media sosial oleh pemerintah daerah telah dilakukan, namun belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam peran media sosial pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas oleh Bupati Pringsewu.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan variabel penting yang disebabkan dari berbagai faktor, yakni internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup komitmen pimpinan, integritas aparatur, dan efektivitas sistem tata kelola birokrasi. Komitmen pimpinan, dalam hal ini Bupati Kabupaten Pringsewu, berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk budaya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Integritas aparatur dan penerapan sistem birokrasi yang efektif menjadi fondasi untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas, antara lain keterlibatan masyarakat, tekanan media, pengawasan lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi komunikasi, khususnya media sosial. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, melaporkan keluhan, dan memantau kinerja pemerintah secara langsung, sehingga pemerintah terdorong untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel (Aprilla et al., 2024). Dengan demikian, interaksi antara faktor internal dan eksternal menunjukkan adanya penyebab signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang sekaligus menegaskan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pringsewu.

Transparansi seringkali tidak dapat terwujud apabila akses publik terhadap informasi masih terbatas atau jika sistem pelaporan tidak berjalan secara optimal. Akuntabilitas pejabat publik semakin meningkat apabila terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam dan proses evaluasi kinerja pemerintah. Hal yang menunjukkan bahwa tingkat

transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dipengaruhi oleh keaktifan masyarakat dalam mengawasi, serta kesiapan pemerintah dalam menyediakan informasi publik secara cepat dan akurat. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial di Kabupaten Pringsewu dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena menghadirkan ruang interaksi publik yang lebih luas dan dinamis.

Media sosial memfasilitasi masyarakat memperoleh informasi secara *real time* sekaligus menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi informasi publik, khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan pemerintahan. Interaksi pemerintah dengan masyarakat melalui platform digital meningkatkan kepercayaan publik karena adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Media sosial mampu memperkuat akuntabilitas kepala daerah dengan memperluas ruang kontrol publik terhadap kebijakan. Keterlibatan aktif pejabat publik di media sosial, khususnya dalam menjawab pertanyaan masyarakat, berdampak pada peningkatan akuntabilitas politik dan administratif (Rantung, 2024). Penggunaan media sosial secara intensif berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pengawasan kebijakan publik (Cahyadi, 2024).

Media sosial dapat menjadi sarana memperkuat legitimasi pemerintah karena keterbukaan informasi meningkatkan akuntabilitas pejabat public selain itu sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium informasi, tetapi juga instrumen evaluasi kinerja pejabat publik melalui opini masyarakat yang terekam di ruang digital. Dengan demikian, secara empiris terdapat konsistensi temuan terkait media sosial berperan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, termasuk pada konteks pemerintahan daerah di Kabupaten Pringsewu.

Meskipun mayoritas penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terdapat pula temuan yang berbeda. Pemanfaatan media sosial oleh kepala daerah tidak selalu efektif karena adanya kesenjangan digital serta rendahnya literasi media masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan pemerintah tidak sepenuhnya dimanfaatkan publik. Meskipun media sosial meningkatkan aksesibilitas informasi, tidak semua informasi yang dipublikasikan pemerintah diverifikasi atau dianggap kredibel oleh masyarakat, sehingga transparansi menjadi bersifat parsial. Akuntabilitas pemerintah melalui media sosial seringkali terbatas hanya pada aspek pencitraan, bukan pada substansi pertanggungjawaban kebijakan.

Perbedaan hasil penelitian ini menandakan bahwa peran media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas masih bersifat kontekstual, tergantung pada kualitas komunikasi pemerintah serta partisipasi masyarakat. Transparency International (2023) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sebesar 34/100. *World Justice Project* (2023) menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 142 negara dengan skor 0,52 dalam aspek *rule of law*. Sementara itu, *Open Government Partnership* (2022) melaporkan skor keterbukaan pemerintah Indonesia sebesar 54/100, lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia Tenggara (61/100). Kementerian PANRB (2023) mencatat rata-rata Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 71,5 (kategori B). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tingkat pusat serta daerah, masih memerlukan peningkatan.

Di tingkat daerah, fenomena penggunaan media sosial juga semakin menonjol. BPS Lampung (2022) mencatat bahwa pelaku internet di Provinsi Lampung memperoleh 5,7 juta orang atau 74,32% dari total penduduk. Diskominfo Lampung (2023) melaporkan bahwa seluruh 12 kabupaten/kota telah memiliki akun media sosial resmi, namun tingkat interaksi rata-rata hanya 35–40% dari

jumlah pengikut. Di Kabupaten Pringsewu, Bupati secara aktif memanfaatkan akun TikTok resmi dengan ribuan pengikut. Akan tetapi, rata-rata interaksi masyarakat hanya berkisar 200–500 per unggahan, jauh lebih rendah dibandingkan jumlah tayangan konten yang dapat mencapai 10.000 kali. Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pringsewu (2022) juga menunjukkan bahwa hanya 52% responden menilai pemerintah daerah cukup transparan dalam penyampaian informasi kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah riset dengan mengkaji dengan lebih spesifik bagaimana media sosial yang digunakan oleh Bupati Kabupaten Pringsewu berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengingat karakteristik daerah ini memiliki dinamika politik lokal serta tingkat partisipasi masyarakat digital yang terus berkembang. Penelitian mengenai peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Media sosial dapat memperkuat keterbukaan informasi publik dengan menyediakan akses cepat dan mudah bagi masyarakat terhadap kebijakan serta program pemerintah.

Pemanfaatan media sosial di tingkat pemerintah daerah terbukti meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas publik karena memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara langsung (Yusman, 2024). Namun, penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah sering kali bersifat simbolik atau sekadar formalitas, hanya untuk menyebarkan informasi tanpa ada mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Perbedaan hasil ini memperlihatkan adanya gap riset, di mana pengaruh media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas tidak selalu signifikan dan bahkan cenderung kontekstual, bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola interaksi digital dengan masyarakat.

Selain temuan yang menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan langsung, sejumlah penelitian juga menekankan adanya variabel perantara (intervening) atau faktor moderasi yang memengaruhi efektivitas media sosial dalam

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Literasi digital masyarakat merupakan variabel penting yang menentukan sejauh mana informasi yang disampaikan pemerintah melalui media sosial dapat dipahami dan digunakan untuk menuntut akuntabilitas. Tanpa literasi digital yang memadai, media sosial justru berpotensi menjadi ruang misinformasi atau hanya dimanfaatkan untuk hiburan semata.

Berdasarkan uraian fenomena, urgensi variabel, hasil penelitian terdahulu, serta adanya perbedaan temuan mengenai peran media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas, maka penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Fokus pada Bupati Kabupaten Pringsewu dipilih karena adanya penggunaan media sosial secara aktif dalam menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat, namun efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum banyak diteliti secara empiris.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian yang masih minim pada konteks kabupaten dengan karakteristik semi-urban serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur administrasi publik, khususnya pada kajian tata kelola pemerintahan berbasis media sosial. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Bupati Kabupaten Pringsewu, variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas media sosial sebagai variabel independen (X) dan transparansi (Y1) serta akuntabilitas (Y2) sebagai variabel dependen. Penelitian ini berfokus pada menganalisis sejauh mana pengaruh media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Media Sosial dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh media sosial dalam meningkatkan transparansi Bupati Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana pengaruh media sosial dalam meningkatkan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh media sosial dalam meningkatkan transparansi Bupati Kabupaten Pringsewu.
2. Menganalisis pengaruh media sosial dalam meningkatkan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada pengembangan literatur administrasi publik, khususnya dalam kajian transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan media sosial di tingkat pemerintah daerah.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mengoptimalkan media sosial sebagai sarana interaksi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan konseptual dan tolak ukur yang mempermudah peneliti dalam proses penyusunan penelitian. Selain itu, telaah terhadap penelitian sebelumnya berfungsi untuk mengidentifikasi apakah penelitian yang serupa telah diteliti. Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk memperkuat kerangka teoretis dalam penelitian ini.

Haryadi (2024) meneliti peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi publik melalui studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial mampu memfasilitasi komunikasi interaktif, mempercepat penyebaran informasi, serta meningkatkan partisipasi publik. Program *Si Cepat Mesi* menjadi bukti inovasi pelayanan publik yang efisien, meski masih terkendala literasi digital dan infrastruktur (Haryadi, 2024).

Penelitian lain oleh Mauni (2025) membahas peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Jawa Timur. Dengan studi literatur, ditemukan bahwa e-government berperan strategis dalam memperkuat *good governance* melalui peningkatan akses informasi, partisipasi publik, efisiensi, dan pencegahan korupsi. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan infrastruktur, resistensi aparatur, serta rendahnya keterampilan digital (Mauni, 2025).

Sementara itu, Nirwana (2023) menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh media online terhadap kepercayaan masyarakat di Dinas Dukcapil Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan sebesar 93%, yang menegaskan efektivitas media online dalam memperkuat legitimasi pemerintah (Nirwana, 2023).

Secara umum, ketiga penelitian terdahulu menegaskan pentingnya media sosial, teknologi informasi, dan media online dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Namun, keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, dan resistensi birokrasi tetap menjadi tantangan. Penelitian ini hadir sebagai upaya menjawab celah penelitian, menitikberatkan pada pengaruh media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan Bupati Kabupaten Pringsewu dalam konteks yang lebih partisipatif.

Tabel 2. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Agus Tri Haryadi (2024)	Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik	Sama-sama meneliti media sosial terkait transparansi dan akuntabilitas	Objek penelitian umum pada administrasi publik, bukan kepala daerah	Media sosial mempercepat informasi, meningkatkan partisipasi, dan mendukung akuntabilitas; kendala literasi digital & infrastruktur.
Chintya Mauni (2025)	Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan	Sama-sama membahas teknologi digital untuk transparansi & akuntabilitas	Fokus pada e-government dan TI, bukan media sosial	Teknologi informasi meningkatkan akses, efisiensi, dan pencegahan korupsi;

	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur			kendala infrastruktur & resistensi aparatur.
Nirwana (2023)	Pengaruh Penggunaan Media Online dalam Kegiatan Pemerintahan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Studi pada Dinas Dukcapil Luwu Utara)	Sama-sama mengkaji media online dalam interaksi pemerintah- masyarakat	Fokus pada kepercayaan masyarakat, bukan transparansi & akuntabilitas	Media online berpengaruh signifikan (93%) terhadap kepercayaan masyarakat.

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2025

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Grand Theory: Teori Administrasi Publik

Administrasi publik dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas dan proses yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga publik dalam mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan, serta menyediakan pelayanan kepada masyarakat (Utami, 2023). Administrasi publik meliputi beragam fungsi utama, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi (Widiastuti, 2025).

Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan efektif, efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi

landasan penting dalam praktik administrasi public (Djafar, 2024). Selain itu, bidang ini juga meliputi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Lebih dari sekadar aktivitas administratif, administrasi publik memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, administrasi publik modern tidak lagi hanya dipandang sebagai mekanisme birokrasi yang berorientasi pada prosedur, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Dwiyanto, 2021). Teori Administrasi Publik memberikan kerangka konseptual bahwa pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang menuntut adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu dapat dipahami sebagai bagian dari praktik administrasi publik kontemporer. Media sosial menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah berinteraksi langsung dengan masyarakat, membuka akses informasi kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, Teori Administrasi Publik menegaskan bahwa administrasi publik di era digital harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

2.2.2 Middle Theory: *Good Governance*

Middle theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Governance*. Prinsip *good governance* menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Prinsip ini menjadi salah satu landasan utama reformasi birokrasi di Indonesia, di mana keterbukaan informasi dan akuntabilitas

dipandang sebagai tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2021).

Good Government Governance (GGG) merupakan suatu sistem atau mekanisme yang dirancang agar para penyelenggara negara dapat menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Sari et al., 2024). *Good governance* juga didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif terhadap masyarakat, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan publik (Widiastuti, 2025). UNDP menguraikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari sembilan aspek, yaitu transparansi, supremasi hukum (*rule of law*), orientasi konsensus, partisipasi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (LAN & BPKP, 2000).

Dengan demikian, *good governance* sebagai middle theory menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu dapat dipandang sebagai praktik nyata implementasi prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan daerah.

2.2.3 Applied Theory: Governansi Digital

Governansi Digital sebagai kerangka upaya mengkaji peran media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Governansi Digital yakni penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas pejabat public (Rusmanto et al., 2025).

Dalam konteks administrasi publik, media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat (Sentanu, 2024). Penerapan Governansi Digital memungkinkan Bupati Kabupaten Pringsewu untuk secara cepat menyampaikan informasi kebijakan, menerima

masuk publik, dan menampung aspirasi warga, sehingga tercipta transparansi informasi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan.

Applied theory ini diterapkan dengan menganalisis konten media sosial resmi Bupati, interaksi masyarakat melalui komentar atau tanggapan, serta persepsi warga terhadap keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah. Dengan menggunakan kerangka Governansi Digital, penelitian ini dapat menilai sejauh mana media sosial berperan sebagai alat peningkatan good governance, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Governansi Digital menjadi lensa teoretis yang menghubungkan praktik penggunaan media sosial dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern, sehingga temuan penelitian dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pringsewu.

2.3 Definisi Konseptual Variabel

Dalam penelitian kuantitatif, definisi konseptual diperlukan untuk memberikan batasan makna terhadap setiap variabel yang diteliti agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam proses pengukuran. Variabel-variabel yang diterapkan pada penelitian ini terdapat satu variabel independen (X), yaitu Media Sosial, dan dua variabel dependen, yaitu Transparansi (Y_1) dan Akuntabilitas (Y_2).

2.3.1 Media Sosial (X)

Definisi Konseptual: Media sosial merupakan sarana bersumber teknologi digital yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan berbagai informasi secara interaktif serta menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Haryadi, 2024). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang memfasilitasi keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta pembentukan citra institusional pemerintah (Rusmanto et al., 2025).

Menurut Rantung (2024), penggunaan media sosial oleh pemerintah merupakan bagian dari praktik governansi digital karena mampu menciptakan transparansi, memperluas akses terhadap informasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, media sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen digital yang digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya Bupati Kabupaten Pringsewu, untuk menyampaikan informasi, menampung aspirasi, dan membangun interaksi dengan masyarakat.

Indikator Media Sosial:

- a. Intensitas penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah;
- b. Tingkat interaktivitas antara pemerintah dan masyarakat;
- c. Keterlibatan masyarakat dalam menanggapi konten yang disampaikan;
- d. Responsivitas pemerintah terhadap isu atau aspirasi masyarakat; dan
- e. Kredibilitas serta keakuratan informasi yang disampaikan melalui media sosial.

Variabel ini diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap aktivitas media sosial resmi Bupati Kabupaten Pringsewu sebagai sarana komunikasi pemerintahan.

2.3.2 Transparansi (Y_1)

Definisi Konseptual: Transparansi merupakan prinsip tata kelola pemerintahan dengan menekankan keterbukaan informasi publik, yakni pemerintah wajib memfasilitasi informasi yang akurat, relevan dan tersedia luas oleh masyarakat (Mauni, 2025). Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami, menilai, dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan secara objektif.

Menurut Dwiyanto (2021), transparansi dalam administrasi publik mencerminkan komitmen pemerintah terhadap penerapan prinsip good governance, yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah dapat dipantau oleh publik. Oleh karena itu, transparansi dalam penelitian ini diartikan sebagai keterbukaan pemerintah daerah, khususnya

Bupati Kabupaten Pringsewu, dalam menyampaikan informasi publik melalui media sosial guna mendukung partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Indikator Transparansi:

- a. Aksesibilitas informasi pemerintahan bagi masyarakat
- b. Kejelasan dan keterpahaman isi pesan yang disampaikan
- c. Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi publik
- d. Keterlibatan masyarakat dalam memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

Variabel transparansi diukur melalui persepsi masyarakat terhadap tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah yang disampaikan melalui media sosial Bupati Kabupaten Pringsewu.

2.3.3 Akuntabilitas (Y₂)

Definisi Konseptual: Akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk memikul tanggung jawab tindakan, peraturan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara transparan dan dapat diukur (Andriana, 2024). Akuntabilitas mengandung unsur tanggung jawab moral, administratif, dan hukum yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan.

Menurut Sentanu (2024), akuntabilitas publik menjadi pilar utama dalam penerapan good governance, karena memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substantif kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pringsewu kepada publik melalui penyampaian informasi, laporan kinerja, serta tanggapan terhadap aspirasi masyarakat melalui media sosial.

Indikator Akuntabilitas:

- a. Keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan laporan kinerja dan capaian program
- b. Tindak lanjut terhadap masukan, keluhan, atau aspirasi masyarakat
- c. Keterbukaan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik dan

d. Konsistensi serta integritas komunikasi pemerintah di ruang publik digital.

Variabel akuntabilitas diukur melalui persepsi masyarakat terhadap sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Bupati Kabupaten Pringsewu, menunjukkan tanggung jawab publik melalui penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintahan.

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Media sosial berperan menjadi media komunikasi publik yang memungkinkan pemerintah memberikan informasi kebijakan, laporan kegiatan, dan menanggapi aspirasi masyarakat secara cepat, terbuka, dan interaktif. Dalam kerangka penelitian ini, penggunaan media sosial dijadikan variabel independen (X), karena merupakan faktor utama yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi (Y_1) merupakan salah satu variabel dependen, yang diukur dari keterbukaan informasi publik, kejelasan isi pesan, ketepatan waktu penyampaian informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Akuntabilitas (Y_2) sebagai variabel dependen lainnya, diukur dari pertanggungjawaban publik, tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat, dan publikasi hasil kerja pemerintah. Kedua variabel dependen ini menunjukkan seberapa efektif pemanfaatan media sosial untuk mewujudkan prinsip Good Governance (Z), yaitu pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

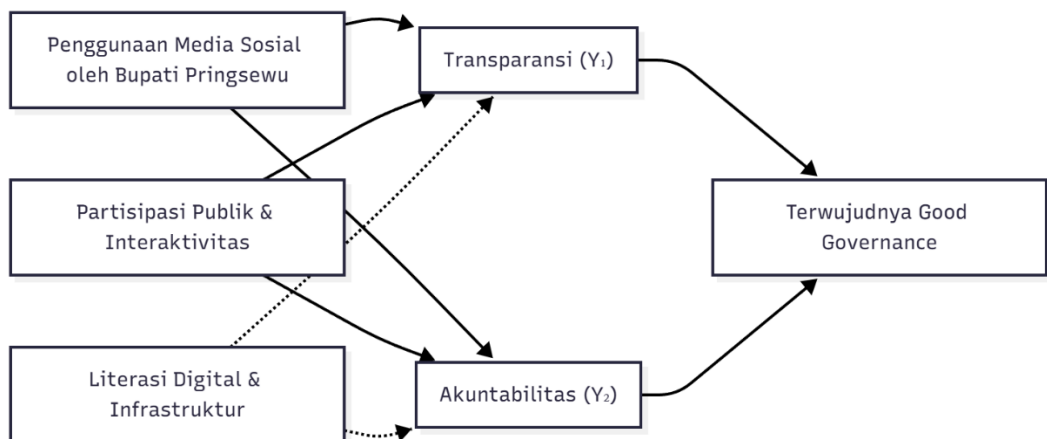
Selain itu, kerangka ini juga memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, seperti partisipasi publik dan interaktivitas pejabat, membantu meningkatkan efektivitas media sosial sehingga transparansi dan akuntabilitas lebih mudah tercapai. Sedangkan faktor penghambat, seperti literasi digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur, dapat mengurangi efektivitas penggunaan media sosial. Dalam bagan, faktor

pendukung ditunjukkan dengan panah langsung menuju Y_1 dan Y_2 , sementara faktor penghambat ditunjukkan dengan panah putus-putus (-.-) yang menandakan pengaruh negatif atau hambatan. Kerangka berpikir ini berlandaskan:

1. Grand Theory: Administrasi Publik, menekankan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Middle Theory: Good Governance, menekankan keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban publik.
3. Applied Theory: Governansi Digital, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya media sosial, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan kerangka ini, terlihat bahwa penggunaan media sosial oleh Bupati memiliki hubungan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya Good Governance. Faktor pendukung memperkuat hubungan ini, sementara faktor penghambat dapat melemahkan efektivitasnya. Penjelasan ini selaras dengan bagan kerangka berpikir, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antarvariabel secara visual maupun naratif.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2025

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, media sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemanfaatan media sosial memungkinkan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi publik secara cepat, membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja pejabat publik.

Sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas (UNDP, 1997), penggunaan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu diyakini berpengaruh terhadap keterbukaan informasi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan dasar tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

2. Hipotesis Utama

H₁: Pemanfaatan media sosial memiliki peran positif dan signifikan pada transparansi pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

H₂: Pemanfaatan media sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

3. Hipotesis Parsial

H_{1a}: Intensitas penggunaan media sosial oleh Bupati berperan positif dengan keterbukaan informasi publik. (*Haryadi, 2024: media sosial mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat*)

H_{1b}: Respons interaktif Bupati terhadap masyarakat melalui media sosial berpengaruh positif terhadap persepsi transparansi publik. (*Mauni, 2025: interaksi digital mendorong efisiensi dan keterbukaan pemerintahan*).

H_{2a}: Frekuensi penyampaian laporan kegiatan dan kebijakan melalui media sosial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. *(Haryadi, 2024 & Nirwana, 2023: media sosial meningkatkan pertanggungjawaban pejabat publik).*

H_{2b}: Tanggapan cepat dan terbuka terhadap kritik masyarakat melalui media sosial berpengaruh positif terhadap persepsi akuntabilitas pemerintah daerah. *(Nirwana, 2023: komunikasi digital memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah).*

2. Hipotesis Statistik

Berdasarkan kerangka berpikir dan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis statistik dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Media Sosial terhadap Transparansi

H₀₁: $\beta_1 \leq 0$, tidak berpengaruh positif penggunaan media sosial terhadap transparansi pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

H_{a1}: $\beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif penggunaan media sosial terhadap transparansi pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

b. Pengaruh Media Sosial terhadap Akuntabilitas

H₀₂: $\beta_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif penggunaan media sosial terhadap akuntabilitas pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

H_{a2}: $\beta_2 > 0$, terdapat pengaruh positif penggunaan media sosial terhadap akuntabilitas pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika nilai Sig. (p-value) $< 0,05$ maka H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti penggunaan media sosial berdampak positif secara signifikan padaa transparansi atau akuntabilitas pemerintahan Bupati Kabupaten Pringsewu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma diketahui sebagai kerangka berpikir atau orientasi filosofis yang menjadi dasar konseptual bagi peneliti dalam memandang, memahami, dan mengarahkan proses pelaksanaan penelitian. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013), paradigma penelitian dipahami sebagai suatu kerangka berpikir yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam menafsirkan serta memahami hubungan antar variabel yang menjadi fokus penelitian. Paradigma penelitian mencakup aspek-aspek seperti jenis dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab, teori yang dijadikan dasar dalam penyusunan hipotesis, bentuk serta jumlah hipotesis yang diajukan, dan teknik analisis statistik yang digunakan dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan paradigma positivisme yang menafsirkan realitas sebagai sesuatu yang bersifat konkret, terukur, dapat dipahami, diklasifikasikan, serta memiliki hubungan sebab-akibat. Paradigma ini dipilih karena penelitian kuantitatif memungkinkan pengklasifikasian data pada variabel-variabel tertentu, sehingga fokus penelitian diarahkan pada variabel yang relevan saja. Dengan demikian, metode kuantitatif yang berlandaskan dengan filsafat positivisme digunakan sebagai meneliti populasi atau sampel tertentu, menyatukan data dengan instrumen penelitian, serta menganalisisnya secara statistik yang bertujuan menguji hipotesis serta menggambarkan fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2013).

Dengan demikian, melalui paradigma positivisme dapat dibentuk keterkaitan sebab-akibat yang eksplisit maupun implisit berkaitan dengan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Penelitian kuantitatif juga bersifat objektif dan bebas nilai, artinya penelitian ini tidak dipengaruhi oleh pandangan

atau nilai-nilai subjektif baik dari peneliti maupun responden, sehingga hasilnya tetap netral dan terukur (Sugiyono, 2013).

3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam mengkaji dan menganalisis fenomena yang diteliti. Berdasarkan tujuan dan karakteristik penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal (sebab–akibat) antara variabel bebas, yaitu *peran media sosial (X)*, dengan dua variabel terikat, yaitu *transparansi (Y₁)* dan *akuntabilitas (Y₂)* Bupati Kabupaten Pringsewu.

Pendekatan kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme, di mana realitas sosial dianggap objektif dan dapat diukur dengan menggunakan instrumen penelitian sehingga dapat menjelaskan pengaruh media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Data yang diperoleh berupa angka (data numerik) selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik sebagai uji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menerapkan metode survei (*survey research*) sebagai metode utama. Metode survei merupakan rancangan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara menyatukan data dari sampel populasi melalui penyebaran kuesioner untuk mengukur pendapat, persepsi, atau sikap responden terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti.

Metode survei digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana media sosial berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Responden dalam penelitian ini akan memberikan jawaban melalui skala pengukuran (Likert) yang telah disusun berdasarkan indikator variabel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik upaya mengetahui arah dan besarnya pengaruh antar variabel.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan metode survei memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi penelitian ini, karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini juga mendukung upaya peneliti dalam menguji hipotesis yang sudah ada sebelumnya, yaitu bahwa media sosial berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu.

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada media sosial resmi Bupati Kabupaten Pringsewu, yang menjadi kanal utama komunikasi publik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Media sosial yang dimaksud meliputi platform digital yang secara aktif digunakan oleh Bupati Kabupaten Pringsewu, seperti Instagram atau TikTok, yang berisi konten terkait aktivitas pemerintahan, kebijakan publik, serta interaksi dengan masyarakat.

Pemilihan objek penelitian pada media sosial didasarkan pada pertimbangan bahwa platform tersebut merupakan sarana utama dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan modern. Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara cepat, terbuka, dan langsung dari sumber resmi, sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Adapun penelitian dilakukan dalam rentang waktu Agustus 2025 sampai Januari 2026, yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data melalui kuesioner daring, pengolahan data, serta penyusunan laporan penelitian.

3.3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini adalah media sosial resmi Bupati Kabupaten Pringsewu, yang digunakan sebagai sarana komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Media sosial tersebut berfungsi sebagai wadah

penyampaian informasi, publikasi kegiatan pemerintahan, klarifikasi kebijakan, serta interaksi langsung antara kepala daerah dengan warga.

Penelitian ini secara khusus menelaah aktivitas dan penggunaan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, yang aktif menggunakan platform digital seperti TikTok sebagai media publikasi dan interaksi. Melalui konten yang dipublikasikan di media sosial tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat penerapan prinsip good governance terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 3. Akun TikTok Bupati Pringsewu

No.	Nama Akun	Pengikut	Suka
1.	@bupati.pringsewu	35K	1,6JT
2.	@mas.riyanto.klangenan	15K	280,9K
3.	@pembkabpringsewu	772	2,6K

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2025

Pemilihan media sosial sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik, yaitu:

1. Relevansi kontekstual: Media sosial merupakan instrumen komunikasi publik yang efektif dan berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat mengenai kinerja dan keterbukaan pemerintah daerah.
2. Kemudahan akses informasi: Aktivitas pemerintahan yang ditampilkan melalui media sosial dapat diamati secara terbuka dan terukur, sehingga memungkinkan analisis kuantitatif terhadap persepsi masyarakat.
3. Urgensi empiris: Fenomena penggunaan media sosial oleh kepala daerah menjadi praktik nyata penerapan governansi digital dalam meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab publik.

Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan pada lokasi fisik pemerintahan, melainkan pada ruang digital (online) tempat berlangsungnya interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu melalui akun media sosial resmi Bupati Kabupaten Pringsewu.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Pringsewu yang mengikuti dan mengakses media sosial resmi Bupati Kabupaten Pringsewu seperti Instagram atau TikTok. Populasi tersebut dianggap relevan karena memiliki pengalaman langsung terhadap aktivitas komunikasi publik yang dilakukan pemerintah daerah melalui media sosial. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pengikut akun TikTok resmi Bupati Kabupaten Pringsewu, dengan nama pengguna @bupati.pringsewu. Akun tersebut aktif membagikan berbagai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan informasi kebijakan daerah melalui konten video pendek.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 Oktober 2025, akun @bupati.pringsewu tercatat memiliki 35.000 pengikut dan memperoleh total 1,6 juta tanda suka. Jumlah tersebut menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap aktivitas komunikasi publik melalui media sosial Bupati Kabupaten Pringsewu.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai bagian keseluruhan populasi (Sugiyono, 2013). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, karena jumlah populasi diketahui secara pasti.

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus Slovin dinyatakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = tingkat kesalahan yang ditoleransi (0,10 atau 10%)

Dengan jumlah populasi 35.000 pengikut, maka perhitungan sampel adalah:

$$n = \frac{10.000}{1+10.000(0,1)^2} = \frac{10.000}{101} = 99,01 \approx 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Jumlah ini dianggap representatif untuk menggambarkan persepsi pengikut akun TikTok Bupati Kabupaten Pringsewu terhadap penggunaan media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini dipilih karena tidak semua pengikut akun TikTok dapat dijadikan responden penelitian, melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria berikut:

1. Mengikuti akun @bupati.pringsewu di TikTok.
2. Pernah menonton, menyukai, atau berinteraksi dengan konten yang diunggah oleh akun tersebut.
3. Berdomisili di Kabupaten Pringsewu.
4. Bersedia menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner secara daring.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online (Google Form) yang dibagikan kepada pengikut akun TikTok @bupati.pringsewu melalui kolom

komentar, pesan langsung, atau komunitas digital masyarakat Kabupaten Pringsewu.

3.5 Metode Operasionalisasi Konsep

Metode operasional konsep dalam penelitian ini berfungsi untuk menurunkan kerangka teori ke dalam bentuk variabel yang dapat diukur secara empiris. Dengan pendekatan kuantitatif, konsep teoretis yang telah dibahas pada Bab II diterjemahkan menjadi variabel penelitian, kemudian dikembangkan ke dalam dimensi dan indikator yang dapat diukur melalui instrumen kuesioner. Proses ini memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan benar-benar merepresentasikan makna konseptual dari teori *Good Governance* dan *Governansi Digital* yang menjadi dasar penelitian ini.

Penelitian ini memiliki tiga variabel utama, yaitu Peran Media Sosial (X) sebagai variabel independen, serta Transparansi (Y₁) dan Akuntabilitas (Y₂) sebagai variabel dependen. Operasionalisasi konsep ketiga variabel ini didasarkan pada hasil sintesis dari teori dan penelitian terdahulu yang relevan di Indonesia.

Tabel 4. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Media Sosial (X)	Platform digital yang digunakan oleh Bupati Kabupaten Pringsewu untuk menyampaikan informasi publik,	1. Intensitas penggunaan 2. Interaktivita 3. Partisipasi publik 4. Responsivita 5. Kredibilitas konten	1. Frekuensi unggahan dan informasi kegiatan pemerintah 2. Respon pejabat terhadap komentar masyarakat

	berinteraksi dengan masyarakat, dan membangun citra pemerintah.		3. Partisipasi masyarakat dalam menanggapi konten 4. Kecepatan tanggapan pemerintah terhadap isu publik. 5. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disampaikan
Transparansi (Y ₁)	Keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang akurat, relevan, dan mudah diakses masyarakat.	1. Keterbukaan informasi publik. 2. Kejelasan informasi. 3. Ketepatan waktu. 4. Keterlibatan publik	1. Akses masyarakat terhadap informasi kebijakan 2. Kejelasan isi pesan di media sosial. 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan. 4. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
Akuntabilitas (Y ₂)	Kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan kepada masyarakat secara terbuka	1. Pertanggungjawaban publik 2. Evaluasi kebijakan 3. Tindak lanjut aspirasi 4. Konsistensi dan integritas komunikasi	1. Publikasi hasil kerja dan laporan kegiatan 2. Kesiediaan menerima kritik dan masukan public 3. Respons terhadap keluhan masyarakat

	melalui media sosial.		4. Konsistensi penyampaian informasi pemerintah
--	-----------------------	--	---

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber; 2025

Setiap indikator dari ketiga variabel tersebut kemudian diterjemahkan menjadi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Untuk mengukur setiap indikator, penelitian ini menggunakan Skala Likert lima poin, dengan kategori:

- 1 = Sangat Tidak Setuju,
- 2 = Tidak Setuju,
- 3 = Netral,
- 4 = Setuju, dan
- 5 = Sangat Setuju.

Skala ini dipilih karena mampu mengukur persepsi dan tingkat kesepakatan responden dengan pernyataan terkait pada penggunaan media sosial, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui alur: Teori → Konsep → Variabel → Dimensi → Indikator → Instrumen (Kuesioner) → Data Empiris.

Dengan demikian, penyusunan metode operasional konsep ini tidak hanya berlandaskan teori *Good Governance* dan *Governansi Digital*, tetapi juga diperkuat oleh temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia. Proses ini meyakini setiap indikator yang digunakan pada penelitian mempunyai dasar ilmiah kuat, relevan, dan sesuai dengan konteks pemerintahan daerah Kabupaten Pringsewu yang sedang bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif harus dilaksanakan dengan sistematis dan terencana, menggunakan instrumen yang valid serta reliabel agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer didapat langsung dari responden dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan variabel, dimensi, dan indikator yang sudah dijelaskan dalam metode operasional konsep, dengan menggunakan Skala Likert lima poin sebagai pengukur persepsi responden. Instrumen ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran sikap, opini, dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan di media sosial.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pringsewu yang aktif menggunakan media sosial, khususnya yang mengikuti akun resmi Bupati atau Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *sampling purposive*, yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa responden dianggap memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam penggunaan media sosial pemerintah.

Data primer ini mencakup persepsi responden mengenai keterbukaan informasi, interaktivitas pemerintah, aksesibilitas data publik, serta tanggung jawab pejabat publik dalam komunikasi digital. Data diperoleh melalui distribusi kuesioner secara daring (melalui *Google Form*) maupun secara langsung (tatap muka) guna memastikan representasi responden yang lebih luas.

2. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui dokumen, laporan, dan publikasi resmi yang relevan.

Sumber data sekunder meliputi laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, situs resmi Bupati Pringsewu, serta data statistik mengenai aktivitas media sosial pemerintah daerah.

Data sekunder juga mencakup hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian Haryadi (2024), Mauni (2025), dan Nirwana (2023), yang digunakan sebagai dasar teoretis dalam merumuskan instrumen dan analisis hasil penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kuantitatif berfungsi memperkuat konteks empiris dan validasi terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

Dengan mengombinasikan kedua jenis data tersebut, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana peran media sosial berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara kuantitatif untuk dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan inferensial sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.7 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data pada penelitian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah memenuhi kriteria kualitas, yaitu validitas dan reliabilitas, serta bahwa model analisis yang akan digunakan layak secara statistik. Pengujian ini penting untuk menjamin bahwa data yang didapat dari responden benar-benar menunjukkan konsep yang diukur dan dapat diolah lebih lanjut dalam analisis kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2013), uji kualitas data merupakan langkah awal dalam analisis kuantitatif untuk memastikan bahwa alat ukur memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi yang tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya dan digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, pengujian data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik (jika menggunakan analisis regresi linear berganda).

1. Uji Validitas

Digunakan sebagai pengukur sejauh mana setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu menggambarkan variabel yang diteliti. Validitas menunjukkan ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, di mana setiap item dikorelasikan dengan skor total variabelnya.

Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel pada taraf signifikansi 0,05. Semakin tinggi nilai korelasi item terhadap skor total, semakin baik tingkat validitasnya. Dalam konteks penelitian ini, uji validitas memastikan jika setiap indikator yang digunakan dalam mengukur variabel peran media sosial, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar merepresentasikan makna konseptual dari variabel tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memberikan hasil yang relatif sama ketika diujikan kembali dalam kondisi yang serupa. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana nilai $\alpha \geq 0,70$ menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik.

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

- r_{11} = koefisien reliabilitas instrument
- k = jumlah item pernyataan
- σ_b^2 = varians skor tiap item
- σ_t^2 = varians total

Reliabilitas menunjukkan kestabilan hasil pengukuran dari waktu ke waktu dan kesesuaian antarbutir pertanyaan dalam satu variabel (Sihotang, 2023). Dengan demikian, uji reliabilitas memastikan bahwa kuesioner penelitian ini dapat memberikan hasil yang konsisten dalam mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Jika analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, maka pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria statistik yang baik (Sihotang, 2023). Uji asumsi klasik terdiri atas:

1. Uji Normalitas, untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal. Pengujian dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov–Smirnov atau Shapiro–Wilk, dengan kriteria data normal apabila nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$.
2. Uji Multikolinearitas, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antarvariabel independen. Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 .
3. Uji Heteroskedastisitas, untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola tertentu pada scatterplot atau nilai Sig. $> 0,05$ pada uji Glejser.

Menurut Santoso (2024), uji asumsi klasik bertujuan memastikan model regresi memenuhi prinsip BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yaitu model dengan hasil yang efisien, tidak bias, dan reliabel. Oleh karena itu, seluruh pengujian ini wajib dilakukan sebelum masuk ke tahap analisis data agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat diinterpretasikan secara ilmiah dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data bertujuan untuk

menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan melalui kuesioner. Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial, dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 26 untuk mempermudah perhitungan statistik dan pengujian hipotesis.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan deskripsi umum terkait karakteristik responden dan persepsi mereka terhadap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan melalui perhitungan distribusi frekuensi, persentase, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap item pertanyaan dalam kuesioner.

Analisis deskriptif berfungsi menggambarkan kondisi data tanpa melakukan generalisasi atau pengujian hipotesis. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini akan menunjukkan profil responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, serta intensitas penggunaan media sosial pemerintah daerah. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap tingkat keterbukaan informasi, interaktivitas pemerintah, serta transparansi dan akuntabilitas melalui media sosial.

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Teknik analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, karena terdapat satu variabel bebas (X) yaitu Peran Media Sosial, dan dua variabel terikat (Y_1 = Transparansi, Y_2 = Akuntabilitas).

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen secara simultan maupun parsial. Persamaan umum model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen (Transparansi atau Akuntabilitas)
- a = konstanta
- b = koefisien regresi (tingkat pengaruh variabel independen)
- X = variabel independen (Peran Media Sosial)
- e = error (faktor kesalahan)

Untuk mengetahui hubungan tersebut, dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Korelasi (r)

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel peran media sosial dengan transparansi dan akuntabilitas. Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 hingga +1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 yang semakin besar menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap variabel dependen.

c. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap masing-masing variabel dependen. Variabel dikatakan

berpengaruh signifikan apabila nilai Sig. < 0,05. Dengan demikian, uji ini akan menunjukkan apakah peran media sosial secara individual berpengaruh terhadap transparansi maupun akuntabilitas pemerintahan.

d. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap seluruh variabel dependen. Model dinyatakan signifikan apabila nilai Sig. < 0,05. Menurut Santoso (2024), uji F digunakan untuk menilai kesesuaian model regresi secara keseluruhan (overall fit), sehingga dapat disimpulkan apakah model mampu menjelaskan hubungan antarvariabel dengan baik.

3.9 Interpretasi Hasil Analisis

Setelah uji statistik dilakukan, hasil analisis akan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori Good Governance dan Governansi Digital yang telah dibahas pada Bab II. Interpretasi ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana peran media sosial berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Menurut Haryadi (2024) dan Mauni (2025), media sosial menjadi instrumen penting dalam menciptakan komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel, karena memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil analisis statistik akan digunakan untuk menguji sejauh mana fenomena tersebut juga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3.10 Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian, selalu muncul keterbatasan yang sulit dihindari oleh peneliti, baik yang bersumber dari metode, waktu, maupun lingkup penelitian. Keterbatasan perlu diuraikan supaya hasil penelitian dapat diketahui dengan proporsional dan menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Menurut Sugiyono (2013), keterbatasan penelitian merupakan bentuk kesadaran ilmiah

peneliti terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi validitas dan generalisasi hasil penelitian. Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Lokasi dan Populasi Penelitian

Dilakukan hanya dalam masyarakat Kabupaten Pringsewu yang menjadi pengikut aktif akun media sosial resmi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya merepresentasikan persepsi masyarakat Pringsewu, bukan masyarakat secara umum. Perbedaan tingkat literasi digital, akses internet, serta pola partisipasi masyarakat di daerah lain dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Seperti dikemukakan oleh Rahmawati (2022), keterbatasan lokasi dan karakteristik responden sering kali membatasi ruang generalisasi hasil penelitian sosial, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang memiliki heterogenitas sosial tinggi.

2. Keterbatasan Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert yang mengukur persepsi responden terhadap peran media sosial, transparansi, dan akuntabilitas. Karena berbasis persepsi, data yang diperoleh cenderung bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, pengalaman pribadi, atau tingkat pemahaman responden terhadap topik penelitian. Menurut Santoso (2024), pengukuran berbasis persepsi memiliki potensi bias karena responden menilai berdasarkan pengalaman individu, bukan pengamatan empiris langsung terhadap kinerja pemerintah.

3. Keterbatasan Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel utama, yaitu Peran Media Sosial (variabel independen), serta Transparansi dan Akuntabilitas (variabel dependen). Padahal, terdapat faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas, seperti kepemimpinan digital, budaya

organisasi birokrasi, dan dukungan kebijakan publik. Menurut Mauni (2025), penelitian administrasi publik dengan pendekatan digital governance sebaiknya mempertimbangkan variabel-variabel kontekstual yang dapat memperkaya model analisis. Oleh karena itu, keterbatasan ini menciptakan celah bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel pendukung agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

4. Keterbatasan Waktu dan Dinamika Media Sosial

Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu, sehingga data yang diperoleh hanya menggambarkan kondisi pada saat penelitian berlangsung. Dinamika penggunaan media sosial yang sangat cepat berubah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan strategi komunikasi pemerintah di waktu berbeda. Haryadi (2024) menegaskan bahwa kecepatan perubahan pola interaksi digital menuntut penelitian sosial untuk memperbarui data secara berkala agar tetap relevan dengan konteks faktual.

Meskipun terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut, peneliti telah berupaya meminimalkan dampaknya terhadap hasil penelitian dengan memastikan keandalan instrumen, validitas data, serta keterpaduan teori dan konteks empiris. Keterbatasan ini tidak mengurangi nilai ilmiah penelitian, melainkan menjadi dasar bagi peneliti berikutnya untuk memperluas ruang lingkup kajian, menambah variabel baru, atau mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan metode kualitatif agar pemahaman tentang peran media sosial dalam tata kelola pemerintahan dapat semakin mendalam dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish.

Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam

upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>

Cahyadi, J. (2024). Peran media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 190–198. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i1.3561>

Djafar, F. (2024). *Teori administrasi publik: Pendekatan analisis dan penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.

Haryadi, A. T. (2024). Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3342-3349.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023*. <https://www.menpan.go.id>

LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Lan, 2.

Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 104-115.

Nirwana, N. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ONLINE DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Study pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Utara) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Open Government Partnership. (2022). *Indonesia: OGP national action plan and progress report*. <https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/>

- Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Digital governansi*. Tahta Media Group. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/download/968/965/3563?utm_source
- Rusmanto, W., Permatasari, A., & Sopandi, E. (2025). *Governansi digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Santoso, S. (2024). *Statistik parametrik untuk penelitian sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sari, S., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2024). *Pengaruh implementasi good government governance pada kualitas pelayanan publik (Studi pada pemerintah daerah di Indonesia)*. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2).
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). *Dinamika governance: Teori, praktek, dan implikasi kebijakan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sihotang, H. (2023). Metode penelitian kuantitatif. UKI Repository. <http://repository.uki.ac.id/13479/1/BukuMetodePenelitianKuantitatif.pdf>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. <https://www.transparency.org/en/cpi>
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.
- Widiastuti, I. (2025). *Teori administrasi publik*. ResearchGate.

World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023*.
<https://worldjusticeproject.org/>

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Serasi Media Teknologi.